

# KAPASITAS KEBIJAKAN DESA PUJON KIDUL KABUPATEN MALANG DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA

**Wildhan Putra Mahirya, Sarwono, Moh. Said**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: wildhanputramahirya@gmail.com

**Abstract: Policy Capacity of Pujon Kidul Village, Malang Regency In Tourism Village Development.** This study examines the policy capacity of Pujon Kidul Village in developing tourism villages. The Tourism Village Policy, initiated by the Ministry of Tourism and Creative Economy, aims to develop local village potential. Pujon Kidul Village, which has achieved national and international accolades, has undergone a lengthy process involving all parties, including village institutions and the community. The study uses a descriptive qualitative method with policy capacity theory by Xun Wu et al. The results show that the policy capacity of Pujon Kidul Village is quite good at the individual, organizational, and system levels. However, optimization is needed in several aspects to face future tourism competition dynamics. This study recommends alternative policies including enhancing leadership capacity, improving village institution quality, maintaining local potential, and actively involving the local community in all tourism village development agendas.

**Keywords:** Policy Capacity; Tourism Village; Pujon Kidul Village

**Abstrak: Kapasitas Kebijakan Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Desa Wisata.** Penelitian ini mengkaji kapasitas kebijakan Desa Pujon Kidul dalam pengembangan desa wisata. Kebijakan Desa Wisata, inisiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertujuan mengembangkan potensi lokal desa. Desa Pujon Kidul, yang telah meraih prestasi nasional dan internasional, melalui proses panjang yang melibatkan semua pihak, termasuk lembaga desa dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori kapasitas kebijakan oleh Xun Wu et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan Desa Pujon Kidul cukup baik di level individu, organisasi, dan sistem. Namun, diperlukan optimalisasi dalam beberapa aspek untuk menghadapi dinamika persaingan pariwisata di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan alternatif kebijakan yang mencakup peningkatan kapasitas kepemimpinan, kualitas lembaga desa, pemeliharaan potensi lokal, dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap agenda pengembangan desa wisata.

**Kata Kunci:** Kapasitas Kebijakan; Desa Wisata; Desa Pujon Kidul

## Pendahuluan

Pembangunan ekonomi melalui pengembangan pariwisata menggerakkan potensi wisata baik alam maupun buatan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya yang menjadi mesin penggerak roda perekonomian pada sektor wisata antara lain alam, manusia, materi, serta kelembagaan pariwisata, baik birokrasi maupun masyarakat lokal. Indonesia, dengan keindahan alam dan kondisi geografis yang melimpah, memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata.

Pariwisata Indonesia sudah terkenal di dunia karena keindahan alam dan keunikan sosial serta budaya. Pada tahun 2022, Indonesia menerima penghargaan sebagai *The World's Most Naturally Beautiful Country* versi *Money UK*, terutama

untuk Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dan Taman Nasional Komodo. Pulau Bali juga diakui sebagai *World's Greatest Places 2022* versi *Time Magazine*. Berikut adalah data kunjungan wisatawan mancanegara per Mei 2023, hingga bulan Mei tahun 2023, tercatat 4.118.521 kunjungan wisatawan mancanegara, dengan 945.950 kunjungan pada bulan Mei, naik 9,21% dari bulan sebelumnya dan 166,42% dari Mei 2022. Lima kebangsaan tertinggi pada bulan Mei 2023 adalah:

1. Malaysia: 169.185 kunjungan
2. Australia: 113.863 kunjungan
3. Singapura: 100.729 kunjungan
4. Tiongkok: 64.056 kunjungan
5. India: 62.680 kunjungan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan kebijakan Desa Wisata untuk meningkatkan kemandirian desa, membuka lapangan kerja, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan mengoptimalkan potensi lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021, pariwisata mencakup berbagai kegiatan wisata dengan dukungan fasilitas dan layanan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Desa Wisata adalah kawasan dengan potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, berbasis kearifan lokal dan dikelola oleh komunitas setempat.

Desa Wisata Pujon Kidul di Kabupaten Malang adalah salah satu contoh sukses. Dengan keindahan alam, potensi sosial budaya, dan kearifan lokal yang kuat, desa ini meraih berbagai penghargaan nasional dan internasional sejak diresmikan pada tahun 2014. Prestasinya termasuk Program Kampung Iklim Nasional (2016), 5 Terbaik Homestay se-ASEAN (2017), Desa Wisata Agro Nasional (2017), dan Desa Wisata Inspiratif ADWI (2023). Desa Pujon Kidul memiliki inovasi seperti Cafe Sawah yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian desa. Pendapatan asli desa meningkat drastis dari Rp 30-40 juta per tahun menjadi lebih dari Rp 1,3 miliar pada tahun 2018. Peran pemuda dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan dukungan kepala desa sangat penting dalam keberhasilan ini.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan memecahkan masalah tertentu. Pemerintah dituntut untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Menurut konsep *Dynamic Governance* oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007), pemerintah harus berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir lintas batas untuk tetap relevan. Kapabilitas kebijakan terdiri dari keterampilan analitis, operasional, dan politik pada tingkat individu, organisasi, dan sistem. Desa Pujon Kidul menunjukkan kapasitas kebijakan yang baik dalam pengembangan desa wisata melalui kepemimpinan, manajemen organisasi seperti BUMDes dan Pokdarwis, serta penggunaan Dana Desa.

Penelitian ini akan memotret kapasitas kebijakan Desa Pujon Kidul dalam pengembangan desa wisata, serta menganalisis alternatif kebijakan untuk masa depan. Penelitian

ini menggunakan data primer melalui wawancara langsung dan melalui referensi dari berbagai jurnal yang membahas kapasitas kebijakan dalam berbagai konteks untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Kimberly Martin, Keith E. Lee Jr., dan John Powell dalam buku "Public Policy: Origins Practice and Analysis" (2022), kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai respons terhadap masalah publik. Kebijakan ini tidak termasuk aktivitas bisnis. Permasalahan publik adalah masalah yang menjadi wewenang pemerintah untuk diselesaikan. Meskipun memiliki kekuasaan, pemerintah sering menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, seperti kecanduan narkoba, kemiskinan, atau tunawisma.

- a) Clark Cochran et al. (2010): "*Public policy is the outcome of the struggle in government over who gets what.*"
- b) Guy Peters (2010): "*Public policy is the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the life of citizens.*"
- c) Thomas Dye (2013): "*Whatever governments choose to do or not to do.*"
- d) Thomas Birkland (2019): "*A statement by government at whatever level in whatever form of what it intends to do about a public problem.*"
- e) Rinfret Scheberle and Pautz (2019): "*A course of action adopted by the government in response to public problems.*"

Sumber: Martin *et al.*, (2022).

Thomas R. Dye (1995) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Hal ini berarti semua tindakan pemerintah, baik implisit maupun eksplisit, adalah kebijakan publik. Peters B. Guy (2015) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah jumlah dari semua aktivitas pemerintah yang berpengaruh pada kehidupan warga negara.

Menurut Martin *et al.*, (2022) tahapan dalam Proses Pembuatan Kebijakan:

- a) Identifikasi Permasalahan: Mengidentifikasi masalah publik yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah.
- b) Agenda Setting: Menarik perhatian pembuat kebijakan untuk memasukkan masalah ke dalam agenda mereka.
- c) Formulasi Kebijakan: Merumuskan masalah menjadi kebijakan tertulis. Pada tahap ini, kelebihan dan kekurangan proposal dipertimbangkan.

- d) Legitimasi Kebijakan: Kebijakan harus sah dan mendapat persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan.
- e) Implementasi Kebijakan: Penerjemahan tujuan kebijakan menjadi tindakan konkret.
- f) Evaluasi Kebijakan: Menilai efektivitas kebijakan dengan membandingkan hasil pelaksanaan dengan yang diharapkan.

## 2. Kapasitas Kebijakan

Kapasitas kebijakan adalah kemampuan pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang efektif. Ini melibatkan pengembangan kapasitas individu, kelembagaan, dan inovasi berkelanjutan. Menurut Meirelee S. Grindle (1997), dalam bukunya yang berjudul *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (1997;8) bahwa seiring berjalannya waktu, definisi mengenai apa yang perlu dilakukan untuk membangun kapasitas, berkembang hingga mencakup tindakan dan proses yang menghubungkan sektor publik, pasar, dan masyarakat sipil; definisi baru ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sama dengan konsep pembangunan. Menurut Xun Wu, (2018) Michael Howlett, dan M. Ramesh dalam buku "*Policy Capacity and Government*" (2018), kapasitas kebijakan mencakup keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan. Keterampilan ini dapat berupa analitis, operasional, dan politis, yang melibatkan sumber daya pada tingkat individu, organisasi, dan sistemik. Berikut Komponen Kapasitas Kebijakan:

- a) *Analytical Capacity*: Kemampuan untuk menganalisis masalah dan solusi kebijakan.
- b) *Operational Capacity*: Kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
- c) *Political Capacity*: Kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan politik untuk kebijakan.

Tingkat Sumber Daya dan Keterampilan:

- a) *Individual Capacity*: Kapasitas individu dalam mendiagnosis masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi kebijakan.
- b) *Organizational Capacity*: Kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, informasi, dan keuangan.
- c) *Systemic Capacity*: Dukungan dan kepercayaan publik serta lingkungan ekonomi dan keamanan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kapasitas kebijakan yang tinggi berhubungan dengan hasil kebijakan yang unggul, sementara defisit kapasitas dapat menyebabkan kegagalan kebijakan. Pemerintahan yang baik

harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, organisasi, dan lembaga negara. Dukungan politik dan ketersediaan sumber daya juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan.

Berikut adalah penjelasan detail mengenai pariwisata berkelanjutan dan pengembangan desa wisata berdasarkan isi dokumen yang telah diberikan:

## 3. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan mengacu pada pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan untuk menjaga sumber daya alam, sosial, dan budaya bagi generasi mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Tiga pilar pariwisata berkelanjutan menurut Bochi (2012) sebagai berikut:

- a) Sosial
- b) Ekonomi
- c) Lingkungan

Yoeti (2006) berpendapat bahwa daya Tarik wisata dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Daya Tarik Wisata Alam  
Daya Tarik yang berasal dari alam meliputi pemandangan alam, laut, pantai, dan pemandangan alam lainnya.
- b) Daya Tarik Wisata dalam Bentuk Bangunan  
Daya Tarik tersebut meliputi arsitektur bersejarah dan modern, peninggalan arkeologi, lapangan golf, dan tempat-tempat perbelanjaan lainnya.
- c) Daya Tarik Wisata Buatan  
Daya Tarik dengan memperhatikan kelestarian budaya yang dimaksud yaitu meliputi sejarah, folklor, agama, seni, tetaer, hiburan, dan museum.
- d) Daya Tarik Wisata Sosial  
Daya Tarik dengan memperhatikan factor sosial di masyarakat meliputi cara hidup masyarakat setempat, Bahasa, kegiatan sosial masyarakat, fasilitas, dan pelayanan masyarakat.

## 4. Desa Wisata

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan ciri khas, sosial budaya, adat istiadat, bentuk bangunan, dan struktur tata ruang yang menarik sebagai tujuan wisata. Menurut Prakoso (2008) faktor-faktor penentu desa wisata yaitu:

- 1) Kelengkapan: Atraksi wisata yang langka dan unik.

- 2) Kealamian: Atraksi yang belum diubah oleh manusia.
- 3) Keunikan: Keunggulan komparatif dari atraksi wisata.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata.
- 5) Optimalisasi Lahan: Penggunaan lahan wisata secara optimal tanpa melupakan konservasi.
- 6) Pemerataan: Manfaat wisata yang merata bagi masyarakat lokal.

Menurut Gamal Suwanto dalam Made Heny (2013), unsur pokok untuk menunjang pengembangan desa wisata meliputi 5 (lima) unsur yaitu sebagai berikut:

- a) Obyek dan Daya Tarik Wisata
- b) Prasarana Wisata
- c) Sarana Wisata
- d) Infrastruktur
- e) Masyarakat

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan analisis implementasi kebijakan desa wisata di Desa Pujon Kidul secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika kapasitas kebijakan desa wisata pada dua periode yang telah berjalan, kondisi kapasitas kebijakan untuk menghadapi tantangan di masa depan, serta alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini dibatasi pada dua fokus utama:

- a) Kondisi Kapasitas Kebijakan: Menilai bagaimana kondisi kapasitas kebijakan Desa Pujon Kidul saat ini.
- b) Alternatif Kebijakan: Mengidentifikasi kebijakan alternatif yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi tantangan masa depan dalam sektor wisata.

Penelitian dilakukan di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Desa ini dipilih karena keberhasilannya dalam mengelola potensi wisata desa yang telah mendapatkan berbagai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa yang semakin baik.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai informan, termasuk kepala desa, sekretaris desa, direktur BUMDes, manajer Café Sawah, pegawai destinasi wisata, dan pengunjung. Data sekunder diperoleh dari dokumen, foto, arsip, buku, jurnal, dan laporan resmi yang relevan dengan penelitian

ini. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Creswell (2014) yang terdiri dari enam langkah. Melalui proses ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan desa wisata di Desa Pujon Kidul, serta menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

### Pembahasan

#### 1. Level 1: Kapasitas pada Level Individu

##### a) Kemampuan Analisis

Kapasitas kebijakan pada level individu mencakup tiga kemampuan utama: analisis, operasional, dan politik. Kemampuan analisis berarti individu harus bisa memahami dan menganalisis masalah yang mendasari kebijakan. Dalam konteks Desa Pujon Kidul, kepala desa menunjukkan kemampuan analisis yang baik dengan mengidentifikasi permasalahan dan potensi desa. Analisis permasalahan dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat dan representasi RT untuk mengumpulkan data masalah dan menyusun skala prioritas pembangunan. Analisis potensi desa dilakukan dengan mengevaluasi kondisi geografis dan demografis untuk mengembangkan pariwisata berbasis alam

##### b) Kemampuan Operasional

Kemampuan operasional pada level individu melibatkan perencanaan, pendelegasian, penganggaran, pengaturan SDM, dan kemampuan koordinasi serta komunikasi. Kepala desa memainkan peran kunci dalam menggerakkan lembaga desa untuk menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

##### c) Kemampuan Politik

Kemampuan politik pada level individu mencakup kemampuan menjalin hubungan dengan pihak eksternal yang memiliki otoritas dalam pengembangan desa. Pengakuan dari masyarakat dan keterlibatan berbagai aktor seperti Kementerian Pariwisata, pihak swasta, dan akademisi menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kemampuan politik yang baik untuk mendukung pengembangan desa wisata.

#### 2. Level 2: Kapasitas pada Level Organisasi

##### a) Kemampuan Analisis

Pada level organisasi, kemampuan analisis melibatkan pengumpulan dan penyebaran informasi, akses terhadap konsultasi kebijakan yang kompetitif, serta dukungan politik terhadap analisis dan evaluasi kebijakan. Organisasi di Desa Pujon Kidul harus memiliki sistem yang dapat mengumpulkan data dan menyebarkan

informasi secara efektif untuk mendukung proses pengembangan.

b) Kemampuan Operasional

Kemampuan operasional di level organisasi mencakup koordinasi antar lembaga pemerintah, keterlibatan komunitas dan jaringan, serta kejelasan peran dan tanggung jawab organisasi. Desa Pujon Kidul menunjukkan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan keterlibatan jaringan komunitas untuk mendukung pengembangan desa wisata.

c) Kemampuan Politik

Kemampuan politik pada level organisasi melibatkan legitimasi proses kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat umum. Desa Pujon Kidul memiliki legitimasi kebijakan yang kuat dengan dukungan dari masyarakat dan berbagai aktor eksternal yang terlibat dalam proses pengembangan .

### 3. Level 3: Kapasitas pada Level Sistem

a) Kemampuan Analisis

Pada level sistem, kemampuan analisis mencakup pengumpulan data dan penyebaran informasi, akses terhadap konsultasi kebijakan, serta dukungan politik untuk analisis dan evaluasi kebijakan. Sistem yang baik diharapkan dapat mempermudah pelaku kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di Desa Pujon Kidul, sistem pengumpulan data belum optimal, dan penyebaran informasi masih dilakukan secara tradisional .

b) Kemampuan Operasional

Kemampuan operasional pada level sistem mencakup koordinasi antar lembaga, keterlibatan komunitas dan jaringan, serta kejelasan peran dan tanggung jawab. Desa Pujon Kidul memiliki sistem koordinasi dan keterlibatan jaringan yang cukup baik, yang membantu dalam proses pengembangan desa wisata.

c) Kemampuan Politik

Kemampuan politik pada level sistem melibatkan akuntabilitas politik, kepercayaan masyarakat, partisipasi aktor non-negara, dan kehadiran pengambil kebijakan. Desa Pujon Kidul menunjukkan kemampuan politik yang baik dengan adanya proses pertanggungjawaban yang transparan dan dukungan dari berbagai jaringan eksternal .

Dengan memahami kapasitas pada setiap level ini, Desa Pujon Kidul dapat terus memperbaiki sistem dan proses kebijakan untuk mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

### 4. Alternatif Kebijakan

Desa Pujon Kidul telah menunjukkan kapasitas kebijakan yang baik dalam pengembangan desa wisata, mencakup level individu, organisasi, dan sistem. Kapasitas ini berperan penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata dan optimalisasi potensi alam desa. Meski kapasitas kebijakan saat ini cukup baik, Desa Pujon Kidul perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi wisata masa depan yang kompetitif. Persiapan ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing desa wisata.

Untuk menghadapi tantangan masa depan, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan:

- a) Kepemimpinan: Kepala desa harus memiliki kepemimpinan yang kuat, termasuk inisiatif, inovasi, komunikasi, dan semangat tinggi. Kepemimpinan ini harus mendorong semua elemen organisasi desa bekerja secara sinergis.
- b) Lembaga Desa: Lembaga desa, termasuk pemerintah desa, BUMDes, kelompok sadar wisata, dan lainnya, harus aktif dan memiliki manajemen yang baik. Kerjasama dan sinergi antar lembaga sangat penting.
- c) Potensi Desa: Desa harus mampu menganalisis dan memanfaatkan potensi lokalnya untuk menarik wisatawan. Potensi ini harus dijaga kualitasnya untuk memastikan keberlanjutan dan daya tarik desa wisata.
- d) Masyarakat Lokal: Masyarakat lokal harus terlibat aktif sebagai subjek pembangunan desa wisata. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti homestay dan pelayanan wisata, penting untuk membangun desa wisata yang berbasis komunitas.

Desa Pujon Kidul memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan dan kompetitif. Dengan meningkatkan kapasitas kebijakan, memanfaatkan potensi lokal, dan melibatkan masyarakat, desa ini dapat menghadapi tantangan wisata masa depan dan terus berkembang.

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian terhadap kapasitas kebijakan dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, beberapa kesimpulan utama dapat diambil sebagai berikut:

#### 1. Kapasitas Individu:

- a) Kepala desa dan aparatur desa menunjukkan kemampuan yang baik dalam hal analisis, operasional, dan politik.
- b) Peran kepala desa sangat signifikan sebagai inisiator utama yang menggerakkan seluruh lembaga desa untuk mengembangkan desa wisata.
- c) Analisis masalah dan perumusan kebijakan dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat desa, sehingga menghasilkan prioritas pembangunan yang didukung oleh warga desa.

#### 2. Kapasitas Organisasi:

- a) Koordinasi antar lembaga desa berjalan dengan baik.
- b) Lembaga desa bekerja sinergis dalam menjalankan program dan kebijakan pengembangan desa wisata.
- c) Sistem pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, untuk memastikan

kebijakan dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.

#### 3. Kapasitas Sistem:

- a) Sistem kebijakan di Desa Pujon Kidul sudah menunjukkan kematangan dalam struktur dan proses.
- b) Terdapat mekanisme evaluasi dan monitoring yang baik untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan.
- c) Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur.

Secara keseluruhan, kapasitas kebijakan yang dimiliki oleh Desa Pujon Kidul dalam pengembangan desa wisata sudah cukup baik. Keberhasilan ini ditunjang oleh peran signifikan dari kepala desa, koordinasi yang baik antar lembaga desa, dan sistem kebijakan yang mulai matang. Namun, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur masih diperlukan untuk mencapai keberlanjutan dan daya saing yang lebih tinggi.

---

#### Daftar Pustaka

- Yoeti, O. A. (2006). **Ilmu Pariwisata: Sejarah Perkembangan, dan Prospeknya**. Jakarta : PT. Perca
- Bockish, J. (2012). **Transportation Sustainability Rating Systems**. Gresham Smith and Partners. Presentation.
- Creswell, J. W. (2014). **Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches** (4th ed.). Sage
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). **Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Jatiluwih Tabanan Bali**. *KAWISTARA*, 3(2), 117-226.
- Dye, T. R. (1995). **Understanding Public Policy**. New Jersey: Prentice Hall.
- Grindle, M. S. (1997). **Getting Good Government, Capacity Building In The Public Sectors of Developing Countries**. UK & USA: Harvard University Press. Diakses dari archive.org.
- Martin, K., Lee, Keith E., & Hall, J. P. (2022). **Public Policy: Origins, Practice, and Analysis**. University of North Gerogia: Unversity Press
- Gafar, T. F. (2016). **Dynamic Governance : Embedding Culture, Capabilities and Changes in Singapore**. Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Peters, B. G. (2015). **Policy capacity in public administration**. *Elsevier: Science Direct Policy and Society*, 34(3-4), 219-228. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.005>
- Prakoso., Agung, A., & Wibisono, H. (2008). **Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Rute Wisata. Kasus: Desa Wisata Srowolan, Sleman**. DIY: Gadjah Mada Yogyakarta.
- Xun, W., Howlett, M., & Ramesh, M. (2018). **Policy capacity: Conceptual framework and essential components**. In *Policy Capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice*. Switzerland: Palgrave Macmillan